

Judul : Sebut Ada Ratu Batubara Rugikan Negara Rp 2,5 T Adik Nazaruddin Bikin Heboh
Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

SEBUT ADA RATU BATUBARA RUGIKAN NEGARA RP 2,5 T

Adik Nazaruddin Bikin Heboh

Di saat ribut-ribut ekspor batubara yang awalnya dilarang lalu dicabut lagi, Anggota Komisi VII DPR, M. Nasir bikin berita heboh. Adik terpidana kasus korupsi, M Nazaruddin itu, menyebut ada sosok Ratu Batubara dari Kalimantan Timur dalam krisis pasokan batubara di dalam negeri. Menurut Nasir, ulah Ratu Batubara ini menyebabkan negara rugi Rp 2,5 triliun.

Keberadaan sosok Ratu Batubara

ini diungkap Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kamis (13/1) lalu.

Rapat ini membahas sejumlah agenda seperti krisis pasokan batubara dalam negeri, larangan ekspor, dan izin tambang batubara. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto itu, berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.

Rapat baru kelar sore hari.

Begitu dibuka, Arifin langsung diberondong banyak pertanyaan. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar misalnya, meminta Arifin menjelaskan kronologi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara.

Anggota lain menanyakan soal pencabutan izin tambang. Apalagi

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

Pihak Tan Paulin Membantah Omongan Adik Nazar

Adik Nazarudin
... DARI HALAMAN 1

pencabulan izin tersebut dilakukan tanpa dibahas. Sementara anggota Komisi VII Nasri Bahar, meminta Kementerian ESDM bersikap tegas kepada perusahaan tambang batubara yang tidak menunaikan kewajiban DMO batubara.

Rapat tambah panas saat M Nasir grillan bicara Anggota DPR dari Fraksi Demokrat itu mengatakan, krisis pasokan batubara dalam negeri karena ada perusahaan yang tidak melaporkan hasil penjualan batubaranya.

Ia lalu mencontohkan sosok Ratu Batubara di Kalimantan Timur. Ratu Batubara ini bisa mencuri batubara dan menjualnya keluar negeri tanpa diketahui. Padahal jumlah batubara yang dijual sangat banyak yaitu 1 juta ton per bulan.

"Ini Tan Paulin namanya. Saya bilang tangkap orang ini, siapa yang melindungi orang ini," kata Nasir.

Kata dia, ulah Ratu Batubara ini membuat infrastruktur di Kalimantan Timur rusak. Padahal, berdasarkan itung-itungan dia, uang yang

dihasilkan dari penjualan batubara tersebut jumlahnya fantastis, hingga Rp 2,5 triliun.

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Eddy Soeparno mengakui, baru mendengar sosok Tan Paulin. Menurut dia, isu ilegal mining dan pihak-pihak yang terlibat tentu harus menjadi perhatian. Namun, sebelum membicarakan sosok Tan Paulin sebagai Ratu Batu Bara, Komisi VII akan mencari data dan faktanya terlebih dulu.

"Tentu ini hal serius, jadi kita akan dalam-dulu supaya data dan faktanya akurat," kata Eddy.

Bukan hanya terkait sosok Tan Paulin, Eddy juga mengatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran jika memang ada laporan terkait aktivitas ilegal mining. "Jika ada laporan masuk ke kami dengan dukungan fakta dan data yang kredibel, tentu akan kami dalam," ungkap Eddy.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Didin S Damanduri meminta, pemerintah tegas dalam mengatasi krisis batubara dengan menindak tegas pengusaha yang nakal. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan setelah Ratu Batubara akan muncul Pangeran

Batu Bara atau bahkan Raja Batubara.

Menurutnya, kasus ilegal mining ini harus ditangani dengan serius mengingat jumlah yang dikeruk mencapai 1 juta ton dan menghasilkan Rp 2,5 triliun tanpa memberikan laporan kepada Kementerian terkait yakni ESDM. Selain itu, negara juga semakin dirugikan karena tidak mendapat pajak ekspor.

Didinding sebagai Ratu Batubara dan merugikan negara, Tan Paulin angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, Yudistira, Tan Paulin mengatakan tuduhan yang disampaikan Muhanned Nasir sangat merugikan dirinya dan jauh dari kebenaran dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Menurut dia, dirinya merupakan pengusaha yang membeli batubara dari tambang-tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) resmi. Selain itu, semua batubara yang diperdagangkan sudah melalui proses verifikasi kebenaran asal usul barang dan pajak yang sudah ditandatangani di LHV (Laporan Hasil Verifikasi) dari surveyor yang ditunjuk.

Tak sampai di situ, Tan mengaku melakukan trading batubara dengan didasari oleh Izin Usaha Pertam-

bangkan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Nomor 94/I/JP/PMDN/2018 yang terdaftar di Minterba One Data Indonesia.

"Adapun kegiatan penjualan batu bara yang dilakukan oleh klien kami sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana batu bara yang dijual mengantongi dokumen resmi," kata Yudistira.

Sementara, jika disinggung mengenai pendapatan negara, Yudistira mengatakan bahwa segala kewajiban pembayaran kepada kas negara telah terpenuhi seperti halnya royalti fee melalui e-PNBP. Pembayaran itu telah dibayarkan oleh pemegang IUP OP tempat asal barang batu bara secara *self assessment* melalui aplikasi SIMPONI atau MOMS berdasarkan quality dan quantity batu bara dengan mengacu kepada Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari surveyor.

Kemudian, Yudistira juga membantah bahwa kliennya menjual batubara curian ke luar negeri. Sebab, batubara yang dijual oleh Tan Paulin ke luar negeri sudah melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. ■ BCG